

Analisis Reviu Laporan Keuangan (Lk) dalam Menilai Unit Kerja di Lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Evie Pangalingan¹, Amir Jaya², Manuel A Todingbua³

Universitas Kristen Indoenesia Paulus, Makasar, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail: eviepangalingan21@gmail.com¹, amirjaya0505@ukipaulus.ac.id²,
manuel_august@ukipaulus.ac.id³

Abstrak

Reviu Laporan Keuangan adalah proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan untuk menilai keandalan, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Reviu Laporan Keuangan (LK) dalam menilai unit kerja di Lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Reviu laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam menilai kinerja unit kerja di Inspektorat Papua Tengah. Melalui evaluasi akuntabilitas, identifikasi masalah, pengukuran kinerja, penyusunan rekomendasi, dan peningkatan transparansi, Inspektorat dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Proses ini tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Kata kunci : reviu, laporan keuangan (lk), unit kerja.

Abstract

Financial Statement Review is the process of evaluation and examination conducted on financial statements to assess their reliability, accuracy, and compliance with applicable accounting standards. This research aims to understand and analyze the Financial Statement Review (FSR) in assessing the performance of work units within the scope of the Inspectorate of Central Papua Province. The object of this research is the Inspectorate of Central Papua Province. This study uses qualitative descriptive methods. The data sources in this research consist of two sources: primary data and secondary data. The data collection methods used in this research include surveys, observations, interviews, and documentation. The informants in this study consist of 5 employees from the Inspectorate of Central Papua Province. The analysis method in this research employs qualitative descriptive analysis. The stages of data analysis in this study include: Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study conclude that: 1) The financial statement review plays a very important role in assessing the performance of work units in the Inspectorate of Central Papua Province. Through accountability evaluation, problem identification, performance measurement,

recommendation formulation, and transparency enhancement, the Inspectorate can improve regional financial management and build public trust in the government. This process not only supports better and more accountable financial management but also provides significant benefits to the community.

Keywords: *review, financial statements (fs), and work units.*

Pendahuluan

Laporan Keuangan (LK) merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan keuangan publik yang berfungsi untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas (Somad et al., 2023). Di lingkungan pemerintah, khususnya di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, laporan keuangan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya negara dilakukan secara efektif dan efisien (Mangallo & Lambe, 2025; Sanggalangi et al., 2025; Setiawan, 2024). Penelitian ini mengambil obyek penelitian di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan fokus penelitian pada Reviu Laporan Keuangan (LK) dalam menilai unit kerja di Lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Analisis reviu laporan keuangan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam konteks peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah (Nisa et al., 2024; Nopriyanto, 2025; Sitorus et al., 2025). Melalui analisis ini, pihak Inspektorat dapat mengidentifikasi berbagai aspek penting dari kinerja unit kerja, termasuk: Kepatuhan terhadap Peraturan: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan yang berlaku; Penggunaan Anggaran: Menganalisis apakah anggaran yang telah dialokasikan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam laporan keuangan yang dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau ketidakefisienan; dan Peningkatan Kinerja: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja berdasarkan hasil analisis laporan keuangan.

Reviu Laporan Keuangan adalah proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan untuk menilai keandalan, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Arum Ardianingsih & CA, 2021; Gasperz et al., 2022; Yunitasari et al., 2024). Proses ini biasanya dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas, seperti pemerintah, organisasi, atau perusahaan, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal menjelaskan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akruwal yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan

keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang dipengaruhi oleh manajemen dan diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan (Mulyasari, 2017; Sari & Rasuli, 2015).

Tujuan pelaksanaan reviu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, apabila tim reviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan atas penyajian laporan keuangan, maka pereviu dapat memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian atau koreksi atas kesalahan tersebut (Masyhur et al., 2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual menyatakan bahwa Inspektorat selaku APIP pada pemerintah daerah harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Herwiyanti et al., 2017; Masyhur et al., 2017). Salah satu dokumen pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pernyataan Tanggung Jawab. Konsep Reviu Laporan Keuangan Dalam pasal 33 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi harus menyelenggarakan SPI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa perbedaan reviu dengan audit yaitu, reviu tidak mencakup pengujian atas Sistem Pengendalian Internal, catatan akuntansi, dan pengujian respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan audit. Kompetensi dan Objektifitas Pereviu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya, tim reviu harus memiliki kompetensi untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Bukit, 2022; Kalumata et al., 2016).

Tahapan Pelaksanaan Reviu di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual menjelaskan bahwa pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga reviu yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP tidak perlu menunggu Laporan Keuangan tersebut selesai disusun. Sebelum melakukan tahapan ini, Inspektorat harus memiliki informasi keuangan yang diperlukan seperti laporan keuangan audited, laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan serta kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Tujuan Reviu Laporan Keuangan adalah untuk Menilai Keandalan Informasi Keuangan: Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas; Memastikan Kepatuhan: Menguji apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan; Identifikasi Penyimpangan: Mengidentifikasi adanya kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan; Memberikan Rekomendasi: Memberikan saran perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Meningkatkan Kepercayaan: Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan pihak berwenang, terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Proses reviu laporan keuangan biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain: Pengumpulan Data: Mengumpulkan laporan keuangan dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk analisis; Analisis: Melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk menilai konsistensi, keakuratan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku; Pemeriksaan: Memeriksa catatan dan transaksi yang mendasari laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah disertakan; Penyusunan Laporan Reviu: Menyusun laporan hasil reviu yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan; dan Tindak Lanjut: Mengawasi dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan diimplementasikan oleh entitas yang direviu. Reviu laporan keuangan merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan melakukan reviu secara rutin, entitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Hasil pengamatan peneliti di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diperoleh informasi bahwa tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali muncul akibat berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, tingkat kompleksitas program, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam (Artana et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan unit kerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Reviu Laporan Keuangan (LK) dalam menilai unit kerja di Lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas program yang tinggi, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap laporan keuangan unit kerja menjadi sangat penting. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dievaluasi secara sistematis, memastikan bahwa mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung perkembangan daerah secara berkelanjutan. Tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali bersumber dari beberapa faktor. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dapat mengakibatkan kesulitan dalam merancang dan melaksanakan program-program yang kompleks. Selain itu, tingkat kompleksitas program yang tinggi memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif. Kondisi sosial ekonomi yang beragam di suatu daerah dapat memengaruhi prioritas dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, analisis laporan keuangan unit kerja menjadi alat yang krusial. Melalui analisis yang mendalam, pengambil keputusan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program, serta memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih responsif dan efektif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kemudian untuk menjawab permasalahan dan mewujudkan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara terhadap pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Peneliti melakukan wawancara dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang didapat berdasarkan operasionalisasi konsep. Wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur membantu peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Pembahasan proses reviu laporan keuangan dilakukan di Inspektorat Papua Tengah

Proses reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah merupakan langkah yang krusial untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yang setiap bagiannya memiliki

peran penting dalam menghasilkan evaluasi yang komprehensif mengenai kinerja unit kerja.

Proses reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, kajian ini akan membahas tahapan proses reviu, relevansinya terhadap peraturan tersebut, serta pentingnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Proses reviu di Inspektorat Papua Tengah terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Tahap pertama adalah pengumpulan laporan keuangan dari unit kerja, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan. Pengumpulan data yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa reviu dapat dilakukan secara menyeluruh.
2. Pemeriksaan Dokumen: Setelah data dikumpulkan, auditor melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, khususnya akuntansi berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan informasi keuangan.
3. Analisis Kinerja: Auditor menganalisis kinerja keuangan berdasarkan indikator yang telah ditentukan, seperti rasio keuangan dan realisasi anggaran. Analisis ini tidak hanya menilai kinerja keuangan, tetapi juga memberikan wawasan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
4. Wawancara dan Diskusi: Auditor berinteraksi dengan pihak terkait di unit kerja untuk mendalami informasi yang ada dan mendiskusikan temuan awal. Interaksi ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks keuangan yang sedang dievaluasi.
5. Penyusunan Laporan Hasil Reviu: Setelah semua langkah di atas, auditor menyusun laporan hasil reviu yang mencakup temuan dan rekomendasi. Laporan ini menjadi acuan bagi Inspektorat dan pihak terkait untuk mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

Relevansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Beberapa poin penting dalam peraturan ini yang relevan dengan proses reviu di Inspektorat Papua Tengah antara lain:

1. Akuntabilitas dan Transparansi: Peraturan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dikelola dengan prinsip akuntabilitas.
2. Standar Pelaksanaan Reviu: Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai tahapan dan metode yang harus diikuti dalam pelaksanaan reviu. Hal ini sejalan dengan tahapan yang dilakukan di Inspektorat, yang memastikan bahwa proses berlangsung sistematis dan terstruktur.
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Dengan mengikuti pedoman dalam peraturan, Inspektorat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit kerja, sehingga informasi yang disajikan lebih akurat dan dapat diandalkan.

Proses reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah memiliki beberapa manfaat penting dalam konteks pengelolaan keuangan daerah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas: Reviu membantu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ini meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dalam penggunaan dana publik.
2. Transparansi Pengelolaan Keuangan: Dengan melakukan reviu yang transparan, masyarakat

dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Identifikasi Masalah dan Peningkatan Kinerja: Proses reviu memungkinkan identifikasi masalah dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diperbaiki. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja ke depannya.

Berikut adalah pembahasan mengenai masing-masing tahapan dalam proses reviu laporan keuangan dilakukan di Inspektorat Papua Tengah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Awal

Proses reviu dimulai dengan pengumpulan laporan keuangan dari unit kerja yang akan direviu. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan tidak hanya laporan keuangan itu sendiri, tetapi juga dokumen pendukung yang relevan, seperti bukti transaksi, jurnal akuntansi, dan catatan lainnya. Pengumpulan data yang lengkap dan akurat sangat penting karena akan menjadi dasar bagi analisis selanjutnya. Jika data yang dikumpulkan tidak memadai, maka hasil reviu dapat menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

2. Pemeriksaan Dokumen

Setelah pengumpulan data, auditor melanjutkan dengan pemeriksaan dokumen. Pada tahap ini, auditor memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua data yang disajikan adalah akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi angka, keabsahan dokumen pendukung, dan kesesuaian dengan standar akuntansi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan yang mungkin ada dalam laporan, serta memastikan bahwa laporan tersebut dapat diandalkan sebagai sumber informasi.

3. Analisis Kinerja

Setelah dokumen diperiksa, auditor melakukan analisis kinerja keuangan unit kerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Analisis ini meliputi evaluasi rasio keuangan, realisasi anggaran, serta pengeluaran yang dilakukan. Dengan melakukan analisis kinerja, auditor dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan keuangan unit kerja tersebut. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dan potensi perbaikan.

4. Wawancara dan Diskusi

Pada tahap ini, auditor melakukan wawancara dengan pihak terkait di unit kerja. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks laporan keuangan dan untuk mendiskusikan temuan awal. Diskusi ini sangat penting karena dapat memberikan insight tambahan yang mungkin tidak tercantum dalam dokumen. Interaksi ini juga membantu membangun komunikasi yang baik antara auditor dan unit kerja, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi proses reviu.

5. Penyusunan Laporan Hasil Reviu

Setelah semua langkah di atas dilakukan, auditor menyusun laporan hasil reviu. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan evaluasi kinerja unit kerja. Penyusunan laporan merupakan langkah akhir yang sangat penting, karena laporan ini akan menjadi acuan bagi Inspektorat dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya. Laporan yang jelas dan terperinci dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan memberikan arah yang tepat untuk perbaikan di masa mendatang.

Proses reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah melibatkan tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan hasil reviu. Setiap tahap memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dievaluasi mencerminkan realitas keuangan unit kerja secara akurat. Dengan melaksanakan proses

ini secara efektif, Inspektorat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah

Pelaksanaan reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas proses reviu. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan dan kendala tersebut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Papua Tengah adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kurangnya auditor yang berpengalaman. Hal ini dapat mengakibatkan proses reviu yang tidak optimal, karena auditor yang kurang berpengalaman mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan analisis yang mendalam. Kurangnya pengalaman ini dapat berujung pada kurangnya ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dan membuat rekomendasi yang tepat. Selain itu, beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas hasil reviu.

2. Kompleksitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dari berbagai unit kerja sering kali memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Variasi ini membuat auditor kesulitan dalam melakukan analisis yang mendalam dan konsisten. Laporan keuangan yang kompleks dapat mencakup berbagai akun, transaksi, dan struktur yang berbeda, sehingga auditor perlu menghabiskan waktu lebih lama untuk memahami dan menganalisis informasi tersebut. Kompleksitas ini juga dapat mengarah pada kesalahan interpretasi dan penilaian yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan yang diambil berdasarkan hasil reviu.

3. Keterbatasan Akses Informasi

Dalam pelaksanaan reviu, auditor sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan dari unit kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai atau ketidaktersediaan data yang dibutuhkan. Tanpa akses yang tepat dan cepat terhadap data yang relevan, auditor tidak dapat melakukan analisis yang komprehensif dan akurat. Keterbatasan ini dapat menyebabkan informasi yang digunakan dalam reviu tidak lengkap, yang berpotensi menghasilkan kesimpulan yang salah dan rekomendasi yang tidak tepat.

4. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman

Rendahnya kesadaran dan pemahaman unit kerja mengenai pentingnya laporan keuangan yang akurat menjadi kendala lain dalam proses reviu. Jika unit kerja tidak menyadari signifikansi dari penyusunan laporan keuangan yang baik, mereka mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pengumpulan informasi dan dokumentasi. Kurangnya kerjasama ini dapat menghambat proses reviu dan membuat auditor kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga mengurangi efektivitas evaluasi yang dilakukan.

5. Teknologi yang Belum Optimal

Penggunaan sistem teknologi informasi yang tidak memadai merupakan tantangan penting dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan. Teknologi yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data laporan keuangan. Misalnya, jika sistem yang digunakan tidak dapat mengintegrasikan data dengan baik atau tidak mendukung analisis data yang kompleks, auditor akan kesulitan dalam melakukan reviu secara menyeluruh. Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi

yang tepat sangat penting untuk mendukung proses reviu yang lebih baik dan lebih cepat.

Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah menunjukkan bahwa terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas proses reviu. Dengan mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, menyederhanakan kompleksitas laporan, meningkatkan akses informasi, meningkatkan kesadaran unit kerja, dan menerapkan teknologi yang lebih optimal, Inspektorat dapat meningkatkan kualitas dan akurasi hasil reviu laporan keuangan, yang pada gilirannya akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Pembahasan peran reviu laporan keuangan dalam menilai kinerja unit kerja di lingkup Inspektorat Papua Tengah

Reviu laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kinerja unit kerja di Inspektorat Papua Tengah. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Beberapa poin penting dalam peraturan ini yang relevan dengan proses reviu di Inspektorat Papua Tengah adalah:

1. Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual: Peraturan ini menetapkan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Reviu yang dilakukan sesuai dengan prinsip ini memungkinkan auditor untuk memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai posisi keuangan unit kerja.
2. Standar Proses Reviu: Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tahapan dan metode yang harus diikuti dalam pelaksanaan reviu. Setiap tahap, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan hasil reviu, harus dilakukan dengan mengikuti standar ini untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan.
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Dengan mengikuti pedoman dalam peraturan, Inspektorat dapat membantu unit kerja dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas. Hal ini mencakup akurasi, keandalan, dan relevansi informasi yang disajikan.

Proses reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah memberikan sejumlah dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan: Dengan adanya proses reviu yang sistematis, unit kerja terdorong untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran.
2. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Hasil dari reviu sering kali mencakup rekomendasi untuk perbaikan. Ini mendorong unit kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan mereka.
3. Membangun Kepercayaan Publik: Transparansi yang dihasilkan dari proses reviu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan, mereka akan lebih cenderung memberikan dukungan kepada pemerintah.

Reviu laporan keuangan di Inspektorat Papua Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kinerja unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, proses reviu dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan evaluasi yang komprehensif. Hal ini tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Reviu laporan keuangan memungkinkan Inspektorat untuk secara langsung menilai sejauh mana unit kerja bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, Inspektorat dapat menentukan apakah unit kerja telah menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi regulasi yang berlaku. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Melalui evaluasi ini, Inspektorat dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai kinerja keuangan unit kerja dan membantu memperbaiki praktik pengelolaan keuangan.

Proses reviu laporan keuangan juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan memeriksa laporan dan dokumen pendukung, auditor dapat menemukan ketidaksesuaian, kesalahan, atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Identifikasi masalah ini sangat penting karena dapat memberikan informasi awal mengenai area yang memerlukan perhatian lebih, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemborosan anggaran. Dengan demikian, reviu berkontribusi pada perbaikan sistem pengelolaan keuangan di unit kerja.

Reviu laporan keuangan memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja unit kerja berdasarkan indikator keuangan dan non-keuangan yang relevan. Dengan menggunakan indikator seperti rasio keuangan, realisasi anggaran, dan pengeluaran, Inspektorat dapat melakukan analisis yang komprehensif tentang kinerja unit kerja. Pengukuran ini membantu dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Hasil dari reviu laporan keuangan sering kali mencakup rekomendasi konkret untuk perbaikan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di unit kerja. Dengan memberikan saran yang spesifik mengenai langkah-langkah perbaikan, Inspektorat dapat membantu unit kerja dalam mengatasi masalah yang ditemukan dan meningkatkan praktik pengelolaan keuangan. Rekomendasi ini tidak hanya bermanfaat untuk unit kerja yang direviu, tetapi juga dapat dijadikan pedoman bagi unit kerja lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Melalui proses reviu yang transparan, Inspektorat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah. Dengan mempublikasikan hasil reviu dan rekomendasi yang dihasilkan, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kepercayaan publik ini juga berkontribusi pada legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Reviu laporan keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menilai kinerja unit kerja di Inspektorat Papua Tengah. Dengan melakukan evaluasi akuntabilitas, identifikasi masalah, pengukuran kinerja, penyusunan rekomendasi, dan meningkatkan transparansi, Inspektorat tidak hanya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah. Proses ini mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Reviu laporan keuangan memainkan peran penting dalam menilai kinerja unit kerja di Inspektorat Papua Tengah melalui evaluasi akuntabilitas, identifikasi masalah, pengukuran kinerja, penyusunan rekomendasi, dan peningkatan transparansi. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi,

seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas laporan, akses informasi, kesadaran unit kerja, dan penerapan teknologi. Dengan mengatasi kendala tersebut, Inspektorat dapat meningkatkan kualitas dan akurasi hasil reviu, sehingga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Proses reviu sendiri dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan hasil reviu, dengan setiap tahapan berperan dalam memastikan akurasi laporan keuangan. Pelaksanaan reviu yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

REFERENCE

- Artana, I. W., Snanfi, F. L., & Sedyaningsih, S. (2024). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(1), 69–81.
- Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. (2021). *Audit laporan keuangan*. Bumi Aksara.
- Bukit, P. J. (2022). *Tinjauan Atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Gasperz, J., Sososutiksno, C., Limba, F. B., Gainau, P. C., Sapulette, S. G., & Latuamury, J. (2022). Reviu Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kota Ambon. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(6), 1793–1798.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23.
- Kalumata, M. C. T., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 5(2), 152–167.
- Mangallo, E., & Lambe, K. H. P. (2025). Efektivitas tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di inspektorat provinsi papua tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
- Masyhur, M., Hardi, H., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai*. Riau University.
- Mulyasari, D. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*. UNPAS.
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Prinsip Akuntabilitas Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Refleksi: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Nopriyanto, A. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*,

6(1), 1–11.

Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92.

Sari, R. N., & Rasuli, M. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 3(1), 1–15.

Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.

Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.

Somad, F. H., Khaddafi, M., & Razif, R. (2023). Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202–222.

Yunitasari, F. A., Setyowati, L., Durya, N. P. M. A., & Pamungkas, I. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 58–71.

Copyright holder:

Evie Pangalingan, Amir Jaya, Manuel A Todingbua (2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

